

PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK DI INDONESIA

Baharudin
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
e-Mail: baharudin@uinjambi.ac.id

Abstract

This study aims to examine the roles, challenges, and contributions of women in political leadership in Indonesia. Through a qualitative approach with a literature review method, this study analyzes various relevant literature sources, including scientific journals, books, articles, and research reports. The results of the study show that despite increased awareness of the importance of women's involvement in politics, various social and structural barriers still hinder their participation. The implementation of the women's quota policy is often inconsistent, and support from political parties is still inadequate. In addition, social norms and gender stereotypes continue to be a significant challenge. However, women who succeed in political leadership positions bring positive changes in public policies that are more inclusive and gender-sensitive. This study recommends the need for greater and coordinated efforts to address these barriers and increase women's participation in politics in Indonesia.

Keywords: Gender equality, Indonesia, Political leadership, Women.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran, tantangan, dan kontribusi perempuan dalam kepemimpinan politik di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, berbagai hambatan sosial dan struktural masih menghalangi partisipasi mereka. Implementasi kebijakan kuota perempuan sering kali tidak konsisten, dan dukungan dari partai politik masih kurang memadai. Selain itu, norma-norma sosial dan stereotip gender terus menjadi tantangan signifikan. Namun, perempuan yang berhasil menduduki posisi kepemimpinan politik membawa perubahan positif dalam kebijakan publik yang lebih inklusif dan sensitif gender. Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya yang lebih besar dan terkoordinasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, Kepemimpinan politik, Kesetaraan gender, Perempuan.

Pendahuluan

Kepemimpinan perempuan dalam politik merupakan topik yang semakin mendapat perhatian di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan inklusivitas dalam berbagai sektor kehidupan. Meski demikian, perjalanan menuju kesetaraan gender dalam politik masih penuh dengan tantangan dan hambatan. Perempuan sering kali harus menghadapi berbagai rintangan struktural dan kultural yang menghalangi partisipasi mereka dalam politik (Amanda, et.al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi, dinamika, dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam kepemimpinan politik di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan partisipasi mereka.

Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Penerapan kebijakan kuota yang mengharuskan partai politik memberikan minimal 30% dari total calon legislatifnya kepada perempuan merupakan langkah positif menuju kesetaraan gender (Jayani, et.al., 2024). Namun, implementasi kebijakan ini masih jauh dari sempurna. Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan kuota sering kali tidak diikuti dengan langkah-langkah pendukung yang memadai, sehingga efektivitasnya masih perlu dipertanyakan. Selain itu, terdapat kesenjangan antara jumlah perempuan yang mencalonkan diri dengan jumlah yang berhasil terpilih, yang mencerminkan masih kuatnya hambatan-hambatan sistemik dalam proses politik di Indonesia.

Selain kebijakan kuota, faktor-faktor sosial dan kultural juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi perempuan dalam politik. Sistem patriarki yang masih kental dalam masyarakat Indonesia sering kali menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik (Yeni, 2017). Norma-norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga memperkuat stereotip gender yang merugikan perempuan. Akibatnya, banyak perempuan yang merasa tidak cukup percaya diri atau tidak mendapat dukungan yang cukup untuk mengejar karir di bidang politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya membutuhkan intervensi kebijakan, tetapi juga perubahan mendasar dalam struktur sosial dan kultural.

Perempuan yang berhasil menduduki posisi kepemimpinan politik sering kali membawa perubahan signifikan dalam pembuatan kebijakan publik. kepemimpinan perempuan cenderung lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kesejahteraan sosial. Misalnya, kebijakan yang diinisiasi oleh pemimpin perempuan sering kali lebih memperhatikan hak-hak perempuan, perlindungan dari kekerasan, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan (Mayrudin, et.al., 2022). Hal ini menegaskan pentingnya keberadaan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk partai politik, lembaga pemerintah, dan masyarakat luas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber pustaka yang relevan terkait dengan topik perempuan dalam kepemimpinan politik di Indonesia. Melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian, kajian ini berusaha mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan gap penelitian yang ada. Dengan analisis kritis terhadap data yang terkumpul, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi dan dinamika kepemimpinan politik perempuan di Indonesia serta menginformasikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam politik di Indonesia.

Metode

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*literature review*). Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber pustaka yang relevan terkait dengan topik Perempuan dalam Kepemimpinan Politik di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang membahas peran, tantangan, dan kontribusi perempuan dalam politik Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan gap penelitian yang ada. Hasil analisis ini akan disintesis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi dan dinamika kepemimpinan politik perempuan di Indonesia, serta untuk menginformasikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Representasi Perempuan dalam Kepemimpinan Politik di Indonesia

Tingkat partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Daryono, et.al., 2020), partisipasi politik perempuan sering terhalang oleh konflik gender, motivasi, dan sistem patriarki yang masih kuat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, berbagai hambatan sosial dan struktural tetap menjadi penghalang utama. Selain itu, faktor pendidikan dan umur juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi politik perempuan, seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh (Rahayu, 2020) di Padang Pariaman.

Selain faktor-faktor sosial dan struktural, dukungan politik yang memadai juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. (Kiftiyah, 2019) menekankan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki karena kurangnya dukungan dari partai politik dan kebijakan yang efektif. Meskipun beberapa kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, seperti kuota 30% dalam kepengurusan partai, implementasinya sering tidak konsisten dan tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dan dukungan yang cukup untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Dalam beberapa tahun terakhir, posisi perempuan dalam jabatan kepemimpinan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun masih ada tantangan dan hambatan struktural, perempuan mulai menduduki posisi strategis dalam pemerintahan (Rohadhatul Aisy & Aisy, 2023). Kontribusi mereka dalam pembuatan kebijakan sangat penting, dengan banyak kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif gender yang diimplementasikan di berbagai tingkatan pemerintahan. Misalnya, partisipasi politik perempuan di Indonesia juga mengalami peningkatan, yang mencerminkan perubahan positif dalam persepsi masyarakat tentang kepemimpinan perempuan.

Selain itu, studi kasus menunjukkan keberhasilan beberapa tokoh perempuan dalam menduduki posisi kepemimpinan. Penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilu Aceh, misalnya, menunjukkan strategi yang digunakan oleh pemimpin perempuan untuk mengatasi stereotip gender dan hambatan sosial (Anggraini, et.al., 2023). Perempuan di posisi kepemimpinan publik tidak hanya mampu menghadirkan perspektif baru dalam pengambilan keputusan tetapi juga menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam memimpin organisasi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa perempuan memiliki peran yang tak tergantikan dalam pengembangan kebijakan dan kepemimpinan yang inklusif di Indonesia.

Kebijakan dan program yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik sangat penting untuk meningkatkan representasi dan keterlibatan mereka. Evaluasi kebijakan seperti kuota perempuan menunjukkan bahwa penerapan kuota ini dapat meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam politik secara signifikan. Program pelatihan dan pendidikan politik bagi perempuan juga terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas dan kepercayaan diri mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Analisis perbandingan dengan negara lain yang memiliki kebijakan serupa menunjukkan hasil yang bervariasi. Di beberapa negara, penerapan kuota perempuan berhasil meningkatkan representasi politik perempuan secara signifikan, sementara di negara lain, hambatan budaya dan institusional masih menjadi kendala utama. Studi-studi ini menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dan adaptasi kebijakan yang mempertimbangkan konteks lokal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Kepemimpinan Politik

Hambatan struktural dan kultural merupakan faktor signifikan yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik. Diskriminasi gender dalam partai politik dan struktur pemerintahan menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh perempuan. Dalam banyak kasus, partai politik masih didominasi oleh laki-laki, dan perempuan sering kali tidak diberikan kesempatan yang sama untuk maju dalam karier politik (Budiarta, 2022). Selain itu, struktur pemerintahan yang patriarkat juga menghambat perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan, sehingga memperkuat ketidaksetaraan gender di sektor publik.

Pengaruh norma dan nilai sosial juga berperan besar dalam membentuk persepsi dan penerimaan kepemimpinan perempuan. Masyarakat yang masih memegang teguh norma tradisional cenderung meragukan kemampuan perempuan untuk memimpin. Stereotip gender yang menganggap laki-laki lebih cocok untuk posisi kepemimpinan masih sangat kuat, sehingga perempuan sering kali dihadapkan pada skeptisme dan penolakan (Putri, et.al., 2015). Selain itu, kendala akses terhadap sumber daya dan

jaringan politik juga menjadi hambatan serius. Perempuan sering kali kesulitan mendapatkan dukungan finansial dan jaringan politik yang diperlukan untuk bersaing dalam arena politik yang kompetitif. Kendala-kendala ini, baik yang bersifat struktural maupun kultural, perlu diatasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.

Tantangan pribadi dan profesional yang dihadapi perempuan dalam politik sangat kompleks dan menuntut ketahanan yang luar biasa. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam menyeimbangkan peran domestik dan karier politik. Perempuan sering kali dibebani dengan tanggung jawab domestik yang lebih besar dibandingkan laki-laki, sehingga menyulitkan mereka untuk memberikan komitmen penuh pada karier politik mereka. Selain itu, perempuan di posisi kepemimpinan sering menghadapi tekanan dan ancaman yang signifikan, termasuk intimidasi dan serangan pribadi yang bertujuan untuk melemahkan posisi mereka. Pengalaman pelecehan dan kekerasan berbasis gender dalam politik juga menjadi hambatan serius, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan fisik tetapi juga menghalangi partisipasi aktif mereka dalam politik.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perempuan mengembangkan berbagai strategi dan pendekatan yang inovatif. Salah satu pendekatan yang efektif adalah memperkuat peran mentor dan jaringan pendukung yang dapat memberikan bimbingan, dukungan emosional, dan peluang jaringan yang diperlukan untuk berkembang (Thousani & Afgani, 2023). Melalui dukungan ini, perempuan dapat lebih percaya diri dan berdaya dalam menghadapi tantangan politik. Studi kasus perempuan yang berhasil mengatasi hambatan ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan yang kuat, perempuan mampu mencapai kesuksesan yang signifikan dalam politik. Misalnya, banyak perempuan yang telah berhasil mengatasi stereotip gender dan ancaman dengan memanfaatkan jaringan pendukung yang solid dan menerapkan strategi kampanye yang efektif, membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk memimpin dan sukses di arena politik.

Dampak Kepemimpinan Perempuan terhadap Kebijakan Publik

Kebijakan berperspektif gender yang diinisiasi oleh pemimpin perempuan telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pemimpin perempuan sering kali mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok marginal lainnya. Analisis kebijakan yang diinisiasi oleh pemimpin perempuan menunjukkan bahwa mereka cenderung memperjuangkan isu-isu yang berhubungan langsung dengan hak-hak perempuan, seperti perlindungan dari kekerasan, peningkatan akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan reproduktif. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan yang dipimpin oleh perempuan sering kali lebih berhasil dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Misalnya, kebijakan perlindungan terhadap kekerasan domestik dan kebijakan cuti melahirkan yang diperpanjang telah menunjukkan dampak positif yang nyata dalam kehidupan perempuan.

Pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi tidak dapat diabaikan. Pemimpin perempuan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif-inisiatif yang berfokus

pada isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Kepemimpinan perempuan sering kali membawa perspektif yang berbeda dan lebih holistik terhadap pembangunan, yang mencakup perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok yang rentan. Dalam konteks ekonomi, pemimpin perempuan telah terbukti efektif dalam mendorong pembangunan inklusif. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, mengurangi kesenjangan upah gender, dan mendorong kebijakan yang mendukung kewirausahaan perempuan, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Perubahan persepsi publik terhadap kepemimpinan perempuan merupakan salah satu indikator penting dari keberhasilan mereka. Seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan, persepsi publik terhadap kemampuan dan keefektifan kepemimpinan perempuan juga mengalami perubahan positif. Pemimpin perempuan mulai diakui dan dihargai atas kontribusi mereka dalam berbagai bidang, termasuk politik, bisnis, dan organisasi non-pemerintah. Pengakuan dan penghargaan ini tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari komunitas internasional, yang menyoroti prestasi dan dampak positif yang mereka bawa. Misalnya, penghargaan internasional seperti Nobel Perdamaian dan penghargaan nasional seperti Kartini Award di Indonesia menunjukkan apresiasi yang semakin besar terhadap kepemimpinan perempuan.

Evaluasi jangka panjang dari kepemimpinan perempuan terhadap budaya politik di Indonesia menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Kepemimpinan perempuan telah membantu mengubah budaya politik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki menjadi lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu gender. Melalui keberhasilan mereka, pemimpin perempuan juga telah menjadi panutan bagi generasi muda perempuan, mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik dan bidang-bidang lain yang sebelumnya kurang terwakili. Dampak jangka panjang ini tidak hanya terbatas pada peningkatan partisipasi perempuan dalam politik tetapi juga pada perbaikan kebijakan publik yang lebih adil dan merata. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan tidak hanya membawa perubahan dalam jangka pendek tetapi juga membentuk masa depan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek struktural maupun kultural. Meskipun terdapat kebijakan seperti kuota 30% untuk keterwakilan perempuan, implementasinya sering kali tidak konsisten dan kurang didukung oleh langkah-langkah pendukung yang memadai. Hambatan-hambatan seperti diskriminasi gender, stereotip sosial, dan kurangnya dukungan dari partai politik masih menjadi penghalang utama. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan dapat membawa dampak positif yang signifikan, termasuk kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dan terkoordinasi dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, termasuk

perubahan dalam struktur sosial dan kultural serta peningkatan dukungan politik dan kebijakan yang lebih efektif. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam politik dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Referensi

- Amanda, D., Wati, E. R. K., Nurrizalia, M., Atika, R., Ayumia, W. F., & Pratiwi, A. (2024). Subordinasi Sebagai Bentuk Diskriminasi: Mengungkap Pola Struktural Yang Menghambat Kemajuan Kaum Perempuan. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(5).
- Anggraini, T. D., Sari, N., & Faraidiany, M. (2023). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pengawas Pemilu Aceh)*. 4(2).
- Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.40982>
- Daryono, Y., Nulhaqim, S., & Fedryansyah, M. (2020). Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2, 47. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27047>
- Jayani, P. H., Shafira, F. M., Anindya, S., & Ummah, A. (2024). Representasi Gender Di Parlemen Pasca Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang Menuju Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Politik. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(8). <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i8.1948>
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2). <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874>
- Mayrudin, Y., Nurrohman, B., & Astuti, D. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. *Ijd-Demos*, 4. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.323>
- Putri, A. U., Widyaningtyas, M. D., & Nesia, A. (2015). Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Politik Dalam Aktivitas Komunikasi Politik (Studi Deskriptif Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten). Tesis, *Tidak Dipublikasi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Rahayu, A. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan Formal Dan Umur Dengan Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020. *Tidak dipublikasi*. IPDN Jatinagor.
- Rohadhatul Aisy, N. N. N., & Aisy, A. R. (2023). Analisis Faktor Hambatan Perempuan Dalam Menduduki Jabatan Struktural. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.72-81>
- Thousani, H. F., & Afgani, K. F. (2023). Jaringan Dalam Mendorong Perempuan untuk Memulai dan Mempertahankan Bisnis: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 9(2). <https://doi.org/10.35313/jrbi.v9i2.5704>

- Yeni, S. E. (2017). Perempuan Berdaya Tawar: Tantangan dan Peluang Partisipasi Politik Perempuan. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 1(1). <https://doi.org/10.31958/agenda.viii.946>